

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian barat telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang dan menukarkan output mereka dengan komoditas-komoditas yang mereka butuhkan (Samuelson & Nordhaus, 2004). Didalam pikiran dari Adam Smith adalah tentang spesialisasi. Menurutny, suatu adanya pabrik atau *factories* sebagai alat produksi terpenting. Didalam pemrosesan suatu produksi setiap para pekerja menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang didasari kemampuan keahlian yang dimiliki setiap para pekerja. Sehingga dengan adanya sistem inilah sangat pesat karena adanya spesialisasi mengalami peningkatan yang telah memungkinkan para pekerja menjadi sangat produktif dalam pekerjaan tertentu hasil (*output*) oleh suatu pabrik akan lebih banyak melampaui jumlah total yang telah apa dihasilkan jika dibandingkan dengan tanpa dilakukan pembagian pekerjaan atau tugas sesuai spesialisasinya (Losina, 2008).

Pada perekonomian tahun 1700-an jika dibandingkan dengan perekonomian dewasa ini yang sangat bergantung pada spesialisasi individu atau juga perusahaan, yang dihubungkan oleh suatu jaringan perdagangan yang luas. Spesialisasi sendiri di dalam ilmu ekonomi merupakan suatu bentuk pembagian tenaga kerja di mana individu atau perusahaan memusatkan usaha-usaha produktif mereka pada sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan-kegiatan yang terbatas. Misalnya spesialisasi pada pembagian upah tenaga kerja yang menjadi spesialis di bidang industri ekonomi. Spesialisasi terjadi apabila orang-orang atau suatu perusahaan memusatkan upayanya pada serangkaian tugas

khusus itu untuk memungkinkan tiap orang atau suatu perusahaan menggunakan keahlian dan sumber dayanya yang khusus untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu fakta kehidupan ekonomi adalah bahwa dari pada tiap orang melakukan segala sesuatu dengan cara yang biasa saja, namun lebih baik menetapkan pembagian kerja yang membagi produksi menjadi beberapa langkah atau tugas khusus (Samuelson & Nordhaus, 2004). Pembagian kerja sangat penting yang dilakukan oleh suatu perusahaan, karena kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Namun setiap tenaga kerja memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang berbeda-beda sehingga dapat dikatakan dengan adanya spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja berdampak dengan pembagian upah, karena semakin banyak spesialisasi kerja, semakin menambah kualitas dan kuantitas produksi dan akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi. Dengan kata lain spesialisasi yang dilakukan pada suatu bentuk industri dilakukan oleh pemilik industri guna memberikan kesejahteraan pada tenaga kerja yang berkontribusi pada suatu usaha tersebut ataupun pada pembangunan ekonomi sekalipun.

Yang mana pembangunan ekonomi artinya adalah suatu proses untuk menaikkan atau meningkatkan pendapatan perkapita yang berlangsung jangka panjang disertai perbaikan sistem kelembagaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pembagian secara merata. Hal ini perlu dipandang sebagai suatu proses kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan tersebut mencerminkan kenaikan pendapatan serta adanya perbaikan dalam kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dengan tujuan untuk memperluas kesempatan kerja dan mengarah kepada pendapatan secara merata. Dalam mencapainya yang sering dihadapi

oleh negara sedang berkembang adalah masalah ketenagakerjaan seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ketidakseimbangan ekonomi antar daerah (Lestariningsih,2006). Selain itu kondisi yang dihadapi oleh negara sedang berkembang adalah terjadinya ledakan penduduk, karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan peningkatan jumlah angkatan kerja tiap tahunnya, sehingga lapangan kerja yang tersedia terbatas daripada jumlah angkatan kerja yang ada. Jumlah penduduk yang besar menyebabkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan yang semakin ketat, sebab itu pertumbuhan penduduk yang harus diimbangi dengan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran, salah satu upaya dalam penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan kesempatan kerja baru adalah dengan pembangunan sektor industri (Budiarty, 2006). Hal tersebut dapat dilihat dari penyajian data jumlah penduduk dan angkatan kerja di Jawa Timur pada tahun 2015-2019 sebagai berikut

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja (Dalam Juta Jiwa) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Jumlah Angkatan Kerja (Juta Jiwa)
2015	38,848	20,7
2016	39,075	19,9
2017	39,293	20,9
2018	39,501	21,3
2019	39,698	21,5

(Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, diolah)

Pada sektor industri terbagi menjadi industri besar, menengah, dan kecil yang sama-sama memiliki peranan besar terhadap penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat guna menggerakkan perekonomian disuatu daerah. Seperti pada negara kita Indonesia, yang sebagai negara berkembang memiliki banyak

keragaman sumber daya alam yang melimpah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri adalah suatu unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi, yang tujuan bertujuan mewujudkan barang dan jasa pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggungjawab atas usaha tersebut.

Untuk menghadapi tersebut, suatu strategi pasar kerja dapat dilakukan guna menciptakan lapangan kerja melalui sektor industri, permaksimalan modal kerja supaya meningkatnya permintaan tenaga kerja dan permaksimalan produktifitas barang jumlah total unit usaha yang tersedia meningkat supaya upah tenaga kerja juga meningkat. Dalam suatu perusahaan, tenaga kerja juga butuh komunikasi dengan lainnya, guna menciptakan tujuan apa yang telah diinginkan, seperti dengan perusahaan yang notabene juga memiliki tujuan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Setiap manusia membutuhkan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaannya dengan cara bekerja. Bekerja merupakan hal yang terpenting untuk memperoleh upah yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Elsa, 2017). Menurut UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu menjalankan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Berikut data angkatan kerja di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015-2019.

Tabel 1.2 Jumlah Angkatan Kerja Di Bojonegoro Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (Ribuan) di Bojonegoro
2015	640,266
2016	-
2017	690,739
2018	661,169
2019	704,639

(Sumber: Badan Pusat Statistik Bojonegoro, diolah)

Upah menjadi persoalan utama dalam ketenagakerjaan, dikarenakan mendapatkan upah adalah tujuan orang yang bekerja. Pada kenyataannya upah yang ditawarkan tidak sesuai dari suatu perusahaan untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari pekerja, maka pekerja menolak apa yang ditawarkan didalam pekerjaan. Didalam masyarakat di Negara Indonesia, terkhususnya bagi golongan menengah bawah dalam bentuk pekerjaan informal banyak terjadi memakai perjanjian secara lisan yang ujungnya akan melemahkan pembuktian jika salah satu melanggar perjanjian di awal. Hal itu terjadi dan menyebabkan masalah karena jabatan pengusaha lebih tinggi dari pada pekerja atau buruh nantinya akan dipekerjakan semena-mena, sehingga berdampak pada pemberian upah dan kesejahteraan buruh yang rendah. Dilihat dari segi upah dalam sisi pekerja adalah suatu hak di lihat dari sisi jumlah, sedangkan di sisi pengusaha di lihat dari produktifitasnya. Hal itu akan sulit untuk ditanganinya karena ada kesamaan penetapan sistem upah minimum regional (UMR) di kabupaten atau kota. Peraturan penerapan upah hanya saja menimbangkan antara kondisi dan kelangsungan hidup didalam suatu perusahaan dan pekerja, sehingga rata-rata pekerja masih mempunyai pendapatan di bawah standard

hidup dan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peraturan penetapan upah minimum (Yuliana, 2016). Salah satunya upah minimum yang berada di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015-2019, bahwasanya upah minimum di Kabupaten Bojonegoro masih dikatakan rendah jika dibandingkan dengan rata-rata semua kabupaten atau kota di Jawa Timur. Berikut penyajian data upah minimum:

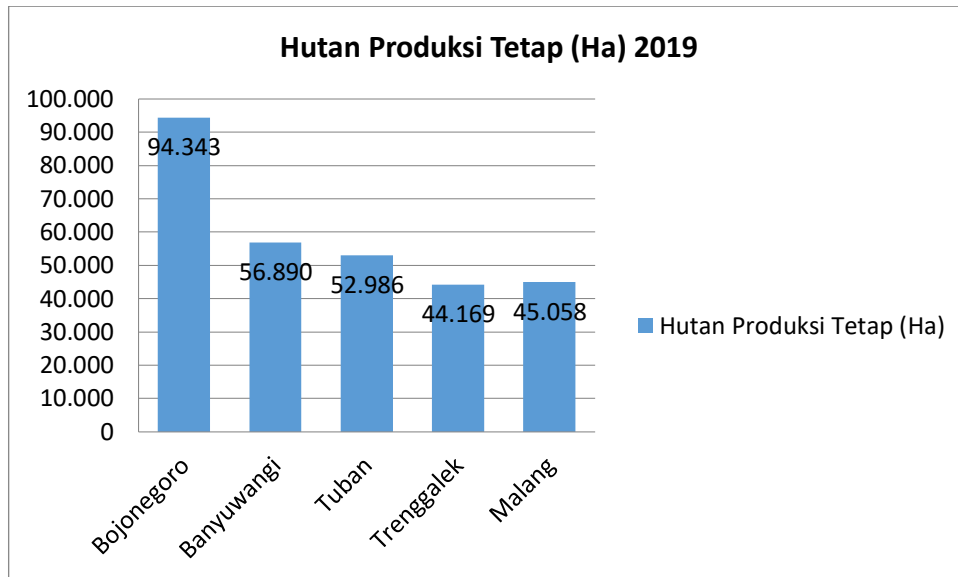
Tabel 1.3 Rata – Rata Upah Minimum Provinsi Jawa Timur dan Upah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2019

Tahun	Upah Minimum	
	Rata-Rata Upah Provinsi Jawa Timur	Upah Kabupaten Bojonegoro
2015	1,546.280	1,311.000
2016	1,727.578	1,462.000
2017	1,871.798	1,582.615
2018	2,034.847	1,720.461
2019	2,254.313	1,858.613

(Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)

Dengan data tersebut salah satu daerah yang memanfaatkan potensi alam yakni Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki keunggulan yaitu kayu sebagai bahan baku utama industri mebel. Potensi ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sehingga desa tersebut terkenal dengan industri mebel. Hal ini dikarenakan hutan produksi merupakan areal yang paling luas keberadaannya di Bojonegoro yang berada di Jawa Timur, berikut penyajian data dibawah ini,

Tabel 1.4 Hutan Produksi Tetap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (hektar), 2019



(Sumber: BPS 2019 Provinsi Jawa Timur, diolah)

Sentra industri mebel di Desa Sukorejo yang ada di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu sektor industri yang diunggul diantara industri lainnya. bahwa jumlah industri mebel yang ada di Kecamatan Bojonegoro tercatat sejumlah 73 unit, dengan jumlah industri mebel terbanyak berada di Desa Sukorejo sejumlah 46 unit usaha mebel, yang kedua Desa Campurejo sejumlah 8 unit, Desa Sumbang dan Kauman memiliki sama 4 unit usaha, di Desa Mojokampung dan Pacul masing-masing memiliki 3 unit usaha, Desa Semanding memiliki 2 unit usaha, dan Desa Jetak, Mulyoagung, dan Banjarjo masing-masing memiliki 1 unit usaha. Industri mebel di Desa Sukorejo memang sudah dikenal masyarakat luas sebagai sentra industry mebel karena keunikannya yang membedakan antara mebel ini dengan daerah lainnya yaitu bahan baku menggunakan kayu jati, sehingga mebel di Desa Sukorejo ini menjadi tahan lama dan kuat. Produk di industry mebel di Desa Sukorejo sudah menembus pasar luar daerah dan bahkan tembus pasar ekspor. Apalagi sentra

industry ini didukung oleh penyediaan bahan baku yang mudah karena di Desa Sukorejo sendiri terdapat tempat penimbun kayu (TPK) milik dari perhutani. Hal ini menjadikan para pemilik usaha mebel tidak akan kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Berikut data dibawah ini tabel 1.5

Tabel 1.5 Banyaknya Perusahaan Industri Kerajinan Rumah Tangga di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro 2019

No	Desa	Tempe	Tahu	Kerupuk	Industri Kain	Roti Bolu	Industri Batik	Mebel
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jetak	2	-	-	-	-	-	1
2	Pacul	11	-	-	-	-	-	3
3	Sukorejo	7	-	-	-	-	-	46
4	Sumbang	5	-	-	3	-	-	4
5	Klangon	1	-	-	1	-	-	-
6	Kepatihan	-	-	-	-	-	-	-
7	Mojokampung	-	-	1	-	-	-	3
8	Kadipaten	1	-	-	-	-	1	-
9	Ngrowo	-	-	-	-	-	-	-
10	Karangpacar	6	-	-	-	-	-	-
11	Campurejo	17	8	-	1	-	-	8
12	Semanding	-	-	-	-	-	-	2
13	Kalirejo	3	-	-	-	-	-	-
14	Mulyoagung	-	-	5	-	-	-	1
15	Banjarjo	-	-	2	-	-	-	1
16	Ledokwetan	7	-	-	-	-	-	-
17	Kauman	10	5	-	-	-	-	4
18	Ledok Kulon	42	64	-	-	-	-	-
	Jumlah	112	77	8	5	-	1	73

(Sumber: BPS bojonegoro 2019)

Sentra industri mebel menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka, namun sumber daya yang melimpah masih belum dikelola dengan optimal, disebabkan pengerajin atau pengusaha masih mengambil bahan baku seperti kayu tidak hanya di Kabupaten Bojonegoro tapi diluar daerah, jika diketahui persediaan bahan baku kayu yang ada di Kabupaten

Bojonegoro bisa mencukupi kebutuhan pengerajin mebel. Selain itu permasalahan yang ada pada industri mebel ini memfokuskan pada spesialisasi kerja dan tingkat upah tenaga kerja industri mebel sendiri, antara lain adanya ketidakdisiplinan pengusaha dalam menetapkan waktu kerja para tenaga kerja seperti pekerja yang mempunyai spesialisasi (keahlian) masuknya sesuka hati hal itu membuat memperlambat produksi mebel karena tidak semua orang yang bisa mengerjakan sesuai apa yang dikerjakan dan banyak juga tenaga kerja yang mengeluhkan upahnya tidak kunjung naik meskipun mereka sudah lama untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Permasalahan yang lain pola spesialisasi kerja, upah oleh tenaga kerja yang berdampak pada kecilnya upah dan hubungan kerja yang bersifat fleksibel seperti buruh paruh waktu, kontrak musiman, buruh borongan, maupun buruh tetap yang bekerja penuh akan tetapi beban kerjanya sangat banyak.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul Spesialisasi Kerja dan Pola Pembagian Upah Tenaga Kerja Industri Mebel (Studi Kasus Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola spesialisasi kerja untuk tenaga kerja di industri mebel di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pola pembagian upah tenaga kerja di industri mebel di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola spesialisasi kerja untuk tenaga kerja di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui pola pembagian upah tenaga kerja di industri mebel di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan menambah kajian ekonomi terutama pada upah tenaga kerja
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan upah tenaga kerja.